

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin berkembang dengan berbagai cara, salah satunya melalui dalih kawin kontrak dengan Warga Negara Asing yang akhirnya disalahgunakan oleh berbagai pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan agar dapat meminimalisir kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini akan membahas rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing pelaku kawin kontrak dan bagaimana unsur pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbasis kawin kontrak pada perkara Nomor 924/PID.SUS/2019/PN.ptk

Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif yang berupa Deskriptif analisis, dengan pendekatan masalah berupa pendekatan kasus. Jenis data berasal dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Pengumpulan data memakai teknik yang berasal dari perbandingan antara Studi Kepustakaan dengan penelitian sebelumnya.

Kawin kontrak tidak termasuk dalam regulasi Perkawinan dan aturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan orang. Hukum negara tidak mengakui kawin kontrak sehingga, sulit untuk mengklasifikasikan perdagangan orang. Dalam hal ini pelaku dapat dituntut dengan Undang-undang yang menatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta aturan tentang Keimigrasian, undang-undang tersebut mengandung unsur yang hampir sama tetapi jika kualifikasinya salah karena tidak memenuhi unsur, maka korban akan merasa dirugikan.

Kata kunci: Kawin Kontrak, Warga Negara Asing, Kejahatan Perdagangan Orang

ABSTRACT

The criminal act of trafficking in persons develops in various ways, through the pretext of contract marriage with foreign nationals which is ultimately abused by the parties involved. aims to minimize the Crime of Trafficking persons in Indonesia. The formulation of the problems to be discussed is related to how criminal responsibility of foreign citizens and how the elements of proof of the Crime of Trafficking Persons in case Number 924./PID.SUS/2019/PN.ptk

These it type of research is normative juridical in form of descriptive analysis, with a problem approach in the form of a case approach. data comes from primary and secondary legal materials. Data collection used a comparison technique between literature studies and previous research.

Contract marriage is not included in the Marriage regulation and the rules governing the crime of trafficking in persons. State law does not recognize contract marriages, it is difficult to classify them. Perpetrators can be prosecuted with the law that regulates the Crime of Trafficking in Persons and the rules on Immigration, which contain almost the same elements but if the qualifications are wrong because they do not meet the elements, then the victim will feel disadvantaged.

Keywords: Contract Marriage, Foreign Citizen, Human Trafficking Crime